

**KERJASAMA INDONESIA-KANADA DALAM UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN DI SULAWESI TAHUN 2010-2014**

Oleh:

Maria Clara Panjaitan*

(mariaclaravanzaitand1995@gmail.com)

Pembimbing : Dra. Den Yealta, M.Phil

Bibliografi : 19 Jurnal, 14 Buku, 14 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study is a qualitative research by conducting literature review and also compiling data from journal, books and website. This study aims to describes about the cooperation between Indonesia and Kanada due to decrease poverty in Sulawesi through BASICS-CIDA Project on 2010-2014 period.

This research uses a liberalism perspective. Liberalism is set on the idea that actors in international system could reach a peaceful world order by doing cooperation or partnership. While the theory is international cooperation, in international cooperation told that the country or the participant of cooperation will get some gain and the problems in both countries can be solved easily. In this study the problem in Indonesia which is poverty can be solved by doing cooperation with Kanada.

By this research the writer finds out that through BASICS-CIDA Project, the poverty in Sulawesi especially in North Sulawesi and Southeast Sulawesi can be solved gradually though the process take much longer time.

Keywords: BASICS-CIDA, Poverty, Education, Health, Sulawesi.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang **Kerjasama Indonesia-Kanada dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sulawesi pada tahun 2010-2014.**

Kemiskinan adalah sebuah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pelayanan kesehatan serta pendidikan.¹ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan inilah yang disebut sebagai garis kemiskinan. Nilai garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal perkapita perhari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan individu dan rumahtangga mendasar lainnya.²

Menurut Ravillion, fenomena kemiskinan merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi saja tetapi juga dengan dimensi-dimensi lain diluar ekonomi. Ravilion juga menambahkan bahwa kemiskinan terdiri dari beberapa

dimensi yaitu dimensi politik, sosial, budaya dan psikologi. Dimensi tersebut saling terkait, saling mengunci dan membatasi.³ Beberapa ciri masyarakat miskin adalah: mereka yang tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka (politik), tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada (sosial), rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan (ekonomi), serta terperangkap dalam rendahnya kualitas SDM yang berujung dengan rendahnya etos kerja, berpikir pendek yang mengakibatkan fatalisme dalam hal budaya/nilai.⁴

Sejak tahun 2000 lalu, ancaman krisis finansial dalam ekonomi global telah menyebabkan kemunduran (*roll back*) pada perkembangan ekonomi dunia. Berdasarkan laporan dari Komite tentang Kebijakan Makro Ekonomi, Pengurangan Kemiskinan dan Pembangunan Inklusif (*Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Inclusive Development*) yang dibentuk oleh Dewan Ekonomi Sosial PBB untuk Asia Pasifik, krisis finansial ini telah menyebabkan tragedi kemanusiaan (*human tragedy*) pada banyak bagian wilayah negara berkembang, termasuk di wilayah Asia Pasifik. Sebagai akibat dari krisis tersebut, lebih dari 26 juta orang kehilangan pekerjaan (*job losses*) dan jutaan orang menganggur (*under employment*) serta mengalami

¹ Chambers. *Pembangunan Desa Dimulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.1998. Hal.13.

² BPS, 2017.

³ Ravillion, *ibid.*

⁴ World Bank. *Introduction to Poverty Analysis* atau *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2002), hal. 12.

bermacam-macam bentuk ketidakstabilan yang berkaitan dengan pekerjaan.⁵

Sulawesi merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pulau Sulawesi menduduki peringkat pulau terbesar ke-4 setelah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Sulawesi berada tepat di tengah Pulau Maluku dan Pulau Kalimantan. Memiliki luas wilayah sebesar 174.600 km² menjadikan Sulawesi turut menempati peringkat pulau terbesar ke-11 di dunia. Secara nasional, Sulawesi merupakan pulau yang paling tinggi rata-rata pertumbuhan ekonominya. Sulawesi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil yaitu sebesar 6,47% per tahun mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,33%.

Namun tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi pulau yang terbagi menjadi 6 provinsi ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai contoh provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Barat merupakan provinsi termuda di Pulau Sulawesi, selain itu Sulawesi barat juga menempati posisi ke-5 sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Sulawesi Barat memiliki tingkat kemiskinan sebesar 23% dari total jumlah penduduknya yang berjumlah 1.158.000 jiwa.

Secara informal, sejarah mencatat bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kanada sudah

⁵ World Bank. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2006), hal. 23.

dimulai sejak tahun 1948.⁶ Tepatnya saat kerjasama antara Indonesia dengan Kanada di Dewan Keamanan PBB dalam mencari pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 oktober 1952, dilakukan penandatanganan persetujuan untuk membuka perwakilan diplomatik di kedua negara berbeda benua ini. Setelah penandatanganan persetujuan itu, pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya membuka perwakilan RI di Quebec. Perwakilan RI di Kanada dikenal dengan nama 'Legation Office'. Pembukaan perwakilan RI di Kanada inilah yang menjadi kali pertama hubungan diplomatik antara Indonesia-Kanada terjadi secara resmi dalam sebuah perjanjian.⁷ Setelah dibukanya perwakilan RI di Quebec, Kanada maka pada tahun 1953 hubungan diplomatik Indonesia-Kanada diresmikan⁸ dan dimulailah berbagai kemitraan yang erat dan bersahabat.

Isu mengenai kemiskinan merupakan fokus perhatian pembangunan di setiap negara. Perhatian terhadap kemiskinan bahkan menjadi isu global yang terungkap secara tegas dalam sasaran-sasaran Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals, MDGs*). MDGs menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrim (*extreme poverty*) dan kelaparan

⁶ Robert Bothwell, *The Big Chill: Canada and the Cold War*, (Canadian Institute for International Affairs /Institut Canadien des Affaires Internationales Contemporary Affairs Series, No 1. Toronto: Irwin Publishing Ltd, 1998) Hlm.15.

⁷ Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kerjasama Bilateral Indonesia-Kanada.

⁸ Kedutaan Besar Kanada di Jakarta, Hubungan Kanada-Indonesia, Transkrip Publikasi CFLI.

(*hunger*) sebagai sasaran utamanya. Target inilah yang kemudian menjadi acuan capaian kemajuan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pada tahun 2005 Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) membuat sebuah pedoman dasar dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pedoman dasar ini disebut sebagai Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SPNK). Strategi inilah yang kemudian menjadi sebuah rujukan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang pemerintah Indonesia dalam rangka pengoptimalan kemitraan dan sumber daya dari berbagai bidang termasuk mitra internasional.

Terdapat 5 strategi utama dalam pedoman ini, yaitu:

1. Perluasan Kesempatan, yakni dibukanya akses pada pengembangan pembangunan pemerintah daerah dari segi pengelolaan administrasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dimana pemerintah akan memberdayakan pihak swasta, organisasi masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap strategi penanggulangan kemiskinan.
3. Peningkatan Kapasitas Melalui Pengembangan Pengelolaan Sistem, Sumber Daya dan Jaringan. Dengan melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan publik yang lebih baik diharapkan akan dapat mendorong pelaku

pembangunan lain (non pemerintah) ikut aktif dalam penanggulangan kemiskinan.

4. Perlindungan sosial. Penegakan dan pengawasan pada peraturan dalam menjaga penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat guna memberikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan.
5. Penataan Kemitraan Global. Pemerintah melihat mitra global sebagai aktor yang bersentuhan langsung atau dinilai memberikan dampak baik terhadap penyelesaian masalah kemiskinan. Pihak asing memiliki peran sebagai penyedia modal dan teknologi, lapangan kerja, pengembangan fasilitas serta sumber pemasukan negara melalui pajak.

Poin terakhir dari pedoman dasar dalam upaya pengentasan kemiskinan inilah yang kemudian membuktikan bahwa dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan, peran dari lembaga internasional atau pihak asing benar-benar mendapat porsi penting dalam penerapannya.

Better Approaches for Service Provision Through Increased Capacities in Sulawesi (BASICS-CIDA) atau Peningkatan Pelayanan Dasar Melalui Pengembangan Kapasitas di Sulawesi merupakan sebuah proyek inisiatif kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri dan

pemerintah Kanada melalui Canada International Development Agency (CIDA) atau yang sekarang dikenal dengan Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD). Proyek ini merupakan implementasi dari kerjasama antara Indonesia dengan Kanada yang ditandatangani pada 02 April 2007 silam. Dalam kerjasama yang ditandatangani pada 02 April 2007 silam, Kanada melalui CIDA telah memberikan dana bantuan sebesar Can\$ 19.4 juta yang di menggunakan perspektif Liberalisme. Liberalisme merupakan salah satu pendekatan ekonomi politik internasional yang lahir sebagai kritikan terhadap Merkantilisme. Liberalisme merupakan paradigma yang dipelopori oleh Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1722-1823). Liberalisme melihat sistem internasional sebagai sebuah sistem yang teratur (layaknya kondisi kelas perkuliahan). Dalam konteks global, Liberalisme berpandangan bahwa dunia ini memiliki tatanan-tatanan yang dapat mengatur masyarakat internasional. Sedangkan dalam konteks negara, Liberalisme berasumsi bahwa negara dapat melakukan kerjasama untuk menciptakan kondisi internasional yang damai dan teratur.

Teori yang digunakan penulis untuk menganalisis kerjasama yang terjadi antara Indonesia-Kanada adalah teori kerjasama internasional. Kerjasama atau yang lebih sering dikenal dengan kemitraan (*partnership*) pada esensinya diartikan sebagai hubungan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Teece kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.⁹ Kemitraan yang baik adalah yang mampu memberi keuntungan atau nilai lebih bagi masing-masing pihak yang bermitra, dengan kata lain yang bisa memberi *win-win solution*. Kemitraan tidak selalu dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama. Setiap pihak yang bermitra bisa saja memiliki tujuan sendiri-sendiri. Esensi terpenting adalah berbagi sumber daya dan saling menguntungkan.¹⁰ Kerjasama antar dua negara atau lebih dalam hubungan internasional disebut sebagai kerjasama internasional. Adanya kerjasama internasional ini bertujuan untuk memudahkan negara dalam

⁹ Teece, D.J., Competition, Cooperation, and Innovation: Organizational Arrangements for Regimes of Rapid Technological Progress. (*Journal of Economic Behavior and Organization*, 1992), hal.18.

¹⁰ Linton, L., 1995, *Op cit.*, hal. 76.

melakukan hubungan dengan negara lain demi mencapai kepentingan nasionalnya.

PEMBAHASAN

Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-4 di Indonesia. Secara administratif, pulau Sulawesi terbagi menjadi 6 provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Meskipun terdapat 6 provinsi di Sulawesi, namun dalam bab ini hanya provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara yang akan dibahas dan dikaji tentang seberapa parahnya tingkat kemiskinan di kedua provinsi di pulau ke-4 terbesar di Indonesia ini. Hal ini karena berdasarkan proses seleksi kompetitif yang dilakukan pada tahun 2008 hanya kedua provinsi inilah yang terpilih untuk ikut terlibat dalam proyek BASICS, yang merupakan implementasi dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Kanada dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sulawesi.

Gambaran kemiskinan di pulau Sulawesi khususnya di provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dilihat dari beberapa aspek seperti Kependudukan (jumlah penduduk dan persebarannya), Ketenagakerjaan (rasio penduduk yang bekerja dan tidak bekerja), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendidikan (angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka pendidikan yang ditamatkan, dan rasio antara guru dan murid) sementara dari aspek kesehatan dilihat dari angka

harapan hidup dan angka kematian ibu dan bayi.

1. Sulawesi Utara

Berdasarkan administrasi wilayah, Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 kabupaten dan 4 kota yaitu: Bolaang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sitaro, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu. Sedangkan jumlah kecamatan sebanyak 156 dengan jumlah desa sebanyak 1.658 desa.

Jumlah penduduk di wilayah Provinsi yang beribukota di kota Manado ini adalah sebanyak 2.270.596 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 156,6 jiwa perkm². Penyebaran penduduk di Provinsi Sulawesi Utara masih dominan bertumpu di Kabupaten Manado yakni sebesar 18,08 persen, Kabupaten Minahasa yakni sebesar 13,67 % sedangkan kabupaten yang dibawah 10% terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu sebesar 2,51%. Jika dilihat dari kepadatan penduduk, kabupaten/kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Manado yakni sebanyak 2.515

jiwa per km² dan yang paling rendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 31,65 jiwa per km².

UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Pembangunan manusia (*human development*) menjadi fokus bagi pembangunan pada umumnya setelah paradigma-paradigma pembangunan sebelumnya dianggap gagal dalam mengatasi masalah kemanusiaan.

2. Sulawesi Tenggara

Provinsi yang berada tepat di bagian tenggara pulau Sulawesi ini beribukota di Kota Kendari. Sulawesi Tenggara resmi menjadi salah satu provinsi di Indonesia pada tanggal 27 April 1964. Dengan luas wilayah 38 ribu km² jumlah penduduk di Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 2,2 juta jiwa. Secara administratif, pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten dan 2 kota, 223 kecamatan dan 2276

desa/kelurahan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Untuk mengukur dimensi pengetahuan (tingkat pendidikan) penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah angka atau persentase yang menunjukkan kemampuan penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis.

Angka rata-rata lama sekolah menurut kabupaten/kota di Sulawesi selama kurun waktu 2010-2014 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan berbanding terbalik dengan angka buta huruf yang terus mengalami penurunan. Angka buta huruf di Sulawesi Utara pada tahun 2010 mencapai 7,10% menurun menjadi 5,24% di tahun 2014. Angka melek huruf di Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 2010-2014 berturut-turut adalah 92,90, 92,41%, 92,41%, 92,43%, 93,62% dan berakhir di 94,76% di tahun 2014.

Jumlah penduduk usia kerja di provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan sepanjang tahun 2012 mencapai 1.676.231 jiwa sedangkan jumlah usia kerja yang bukan angkatan kerja

atau pengangguran mencapai 638.103 jiwa.

Profil BASICS

Better Approaches for Service Provision Through Increased Capacities in Sulawesi (BASICS) atau Peningkatan Pelayanan Dasar Melalui Pengembangan Kapasitas di Sulawesi adalah proyek inisiatif kerjasama pemerintah Kanada melalui Department of Foreign Affairs Trade and Development (DFATD-Kanada) dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada 2 April 2007 di Jakarta.

Nota Kesepahaman ini secara efektif berlangsung untuk selama tujuh tahun sejak ditandatanganinya, dengan total nilai kontribusi yang diberikan oleh pemerintah Kanada sebesar Can\$ 19.427.923 (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tiga dolar Kanada) melalui penugasan kepada Cowater sebagai Badan Pelaksana Kanada untuk melaksanakan seluruh proyek termasuk administrasi keuangan dan pengelolaan teknis proyek dalam dokumen Project Implementation Plan (PIP) yang telah disepakati bersama.¹¹

Proyek BASICS terdiri atas dua komponen utama. Komponen pertama adalah pengembangan kapasitas (*Capacity Development*) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pihak (eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat sipil) di daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar

kesehatan dan pendidikan, melalui: (1) peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran; (2) penguatan kapasitas DPRD dalam melakukan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan terkait penyediaan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat; (3) penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam mendukung dan mengawasi kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan di daerah; dan (4) pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.

Komponen kedua adalah BASICS Responsive Initiative (BRI) yang merupakan dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung inovasi atau praktik cerdas yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan untuk percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dan pendidikan dan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs).

Dalam pelaksanaan proyek BASICS, Kanada melalui CIDA telah mengalokasikan dana bantuan sebesar Can \$19.4 juta selama periode 2009-2013. Melalui BASICS, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (fokus pada pendidikan dan kesehatan) yang terdesentralisasi secara setara dan peka gender sehingga Indonesia dapat mencapai target MDG's terkait upaya pengentasan kemiskinan di Sulawesi.

¹¹ BASICS. Introduction. 2010. Laporan Kemajuan Tahunan. Hal. 1-3.

Tujuan Proyek BASICS adalah untuk memperkuat dan mengkaitkan proses perencanaan dan penyusunan anggaran secara partisipatif, berpihak pada kaum miskin, setara gender dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan menuju penyediaan pelayanan masyarakat yang lebih baik di kabupaten/kota pilihan di Sulawesi.

Implementasi Proyek BASICS

Melalui program *Capacity Development*, BASICS-CIDA mengadakan lokakarya pelatihan besar terhadap para pemangku kepentingan tingkat legislatif (kabupaten/kota) di Sulawesi dalam rangka pengembangan perda yang mengamanatkan perencanaan dan penganggaran berbasis SPM/MDG's. Selain itu BASICS juga menyelenggarakan pelatihan multi pemangku kepentingan yang bertujuan membantu para anggota legislatif dalam melakukan analisis APBD. Pelatihan ini difokuskan pada upaya untuk memastikan prioritas alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program program yang membantu mencapai SPM di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan melalui BRI, BASICS melakukan beberapa program kegiatan seperti berikut:

- Peningkatan keterampilan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.
- Pelatihan Teknis.
- Lokakarya Peningkatan Kapasitas.
- Studi Banding
- Magang
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

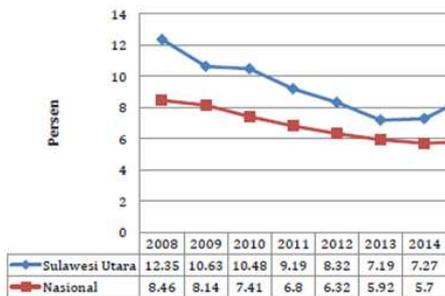
Dukungan BRI Dalam Bentuk Aset Fisik

Selain dukungan kegiatan yang mengarah pada upaya pencapaian SPM/TPM, BRI juga mendukung fasilitas aset fisik layanan kesehatan dan pendidikan di 10 kabupaten/kota. Aset tersebut kemudian menjadi aset yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, melalui mekanisme penyerahan aset sesuai sistem perundangan-undangan yang berlaku. Beberapa jenis barang/peralatan dan fasilitas yang didukung BRI diantaranya: bangunan PKBM (4 buah), katinting (2 buah), laptop (21 buah), komputer/desktop (49 buah), printer (32 buah), LCD projector (8 buah), LCD screen (1 buah), external drive (4 buah), handy cam (1 buah), sepeda motor (29 buah), mikroskop (5 buah), alat peraga perawatan bayi (1 buah), pendingin ruangan (2 buah), HB meter (80 buah), asfiksia kit (15 buah), buku ajar untuk PKBM (1.600 buah) serta peralatan berupa meja, kursi dan rak buku bagi 2 PKBM di Wakatobi dan 7 PKBM Baubau.

Dampak Kerjasama Indonesia-Kanada dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sulawesi.

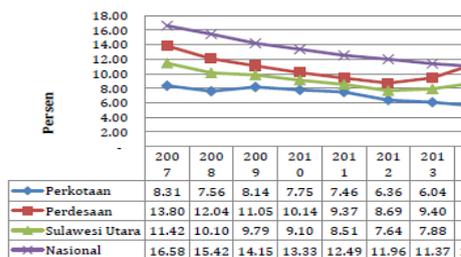
1. Pengurangan jumlah pengangguran.

Grafik 4.1



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2008 hingga 2014 jumlah pengangguran di Sulwesi Utara terus mengalami signifikansi penurunan. Kenaikan hanya sempat terjadi di tahun 2014, yaitu 7,19 pada 2013 dan naik menjadi 7,27 di tahun 2014.

2. Pengurangan jumlah penduduk miskin



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara dari sejak 2007-2012 terus mengalami signifikansi penurunan. Peningkatan hanya terjadi di tahun 2013-2014 itupun masih lebih kecil jika dibanding kan dengan jumlah

penduduk miskin tingkat nasional yang mencapai 10,96%.

KESIMPULAN

Kerjasama Indonesia-Kanada dalam upaya pengentasan kemiskinan yang terimplementasi melalui proyek BASICS-CIDA memberikan pengaruh positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Sulawesi. Hal ini terlihat dari signifikansi penurunan jumlah penduduk miskin dan jumlah usia angkatan kerja namun tidak bekerja atau pengangguran di Sulawesi. Selain itu selama kurun waktu 2010-2014 Sulawesi juga menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di tingkat nasional yaitu sebesar 6,33%.

Dari penelitian ini, diketahui juga bahwa investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dimana sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu indikator penting dan dominan dalam keberhasilan pembangunan suatu negara atau pun daerah. Meskipun hasil dari dampak investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan terlihat lambat dan berjenjang namun bukan tidak berpengaruh terhadap upaya pengentasan kemsकिन si suatu daerah atau negara.

REFERENSI

Jurnal

Arius, Jonaidi. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan

- Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. 1. No. 1, April 2012. Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sunusi, Dewi Kurniawati. Kumenaung, Anderson dan Rotinsulu, Debby. 2014. Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. Vol.14. No. 2. Mei 2014.
- A4DES. Laporan Kerjasama Masyarakat Sipil dan Pemerintah: Suatu Pembelajaran Dalam Kerangka *Aid Effectiveness* di Indonesia.
- Azwar dan Subekan, Rachmad. 2013. Analisis Kemiskinan di Sulawesi Selatan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Indonesia
- BASICS. Laporan Kemajuan Tahunan periode 01 Januari-31 Desember 2012.
- BASICS Enhancing Social Services. Annual Progress Report (01 January-31 December 2013).
- BAPPENAS. 2012. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional.
- Brasit, Nurdin. 2013. Efektivitas Strategi Penguatan Masyarakat Sipil (Civil Society) Pada BASICS Project-CIDA di Sulawesi.
- Mastuti, Sri. 2014. Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Untuk Pencapaian SPM dan MDG's. Proyek BASICS.
- Purnawati, Endah Bayu. Desember 2011. Tinjauan Terhadap Upaya Pengektifan Bantuan Luar Negeri di Indonesia. Analisis CSIS, Vol. 40, No. 4.Hlm 564-589.
- Report on Plans and Priorities 2010 2011. Foreign Affairs and International Trade Canada.
- Soleh, Ahmad. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Region Di Indonesia Tahun 2001-2010. *Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan (JEPP)* Volume:04.No.03.
- The World Bank. 2013. Indonesia Economic Quarterly (IEC) atau Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia: Tekanan Meningkat. Annual Report of World Bank Edisi Maret 2013.
- World Bank. 2002. *Introduction to Poverty Analysis* atau Dasar dasar Analisis Kemiskinan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- World Bank. 2006. Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Yazfinedi. 2009. Pengembangan Sumber Daya Terpadu. *Quantum* Vol. 6, No. 11.
- D. Lewis, J dan Robinson, S. 1996. Partners or Predators? The Impact of Regional Trade

Liberalization on Indonesia.
Policy Research Working Paper.
Hal 1-44.

Kementerian Perdagangan RI. 2011.
Warta Ekspor. Jurnal Bulanan
Kemendag RI Edisi Februari
2011.

BUKU

Amstutz, Mark R. 2010. *International
Conflict and Cooperation: An
Introduction to World Politics*.

Alwi, Syafaruddin. 2001. *Manajemen
Sumber Daya Manusia: Strategi
Keunggulan Komparatif*. Edisi
Pertama. Yogyakarta: BPFE
UGM.

Brown, C., & Anley, K. 2005.
*Understanding International
Relations*. New York: Palgrave
Macmillan.

Cardoso, Gomes Faustino (2003).
*Manajemen Sumber Daya
Manusia*. Yogyakarta: Andi
Offset.

Danim, Sudarwin (2003). *Ekonomi
Sumber Daya Manusia*.
Bandung: Pustaka Setia.

Jackson, Robert. Sorensens, George.
2013. *An Introduction to
International Relations:
Theories and Approaches*.
Oxford: Oxford University Press.

Nanto, Dick K. "The Global Financial
Crisis: Analysis and Policy
Implication: Congressional
Research Service.

Sukirno, S. 2004. *Makroekonomi: Teori
Pengantar*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Tambunan, T. H. 2001. *Perekonomian
Indonesia*. Jakarta: Ghalia
Indonesia.

Todaro, Michael. 2006. *Pembangunan
Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi
Keempat Jilid 1. Jakarta:
Erlangga.

Todaro, Michael P. 2007. *Ekonomi Untuk
Negara Berkembang; Suatu
Pengantar Tentang Prinsip- Prinsip,
Masalah dan Kebijakan
Pembangunan*. Edisi ke 3. Jakarta:
Bumi Aksara.

Todaro, Michael P. 2008.
*Pembangunan Ekonomi di
Dunia Ketiga*. Edisi Keempat.
Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen
C. 2011. *Pembangunan
Ekonomi*. Edisi Kesembilan.
Jakarta: Erlangga.

Winarno, W. 2007. *Analisis
Ekonometrika dan Statistik
Dengan Eviews*. Yogyakarta:
UPP STIM YPKN Yogyakarta.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widarti, Diah (1993). *Training
Module Course in
Manpower Analysis and
Planning, Integrated Human
Resources Development*.
Jakarta: RMPT, BAPPENAS.

Internet

Hubungan Indonesia-Kanada. Diakses
melalui
http://www.indonesiaottawa.org/page.php?s=2100hubungan_indonesia_kanada pada 02 Oktober 2016
pukul 15:00 WIB.

Sekilas tentang proyek BASICS.
Diakses melalui <https://www.devex.com/funding/programs/basics-better-approaches-to-service-provision-through-increased-capacities-in-sulawesi-project-in-indonesia/1776> pada 02 Oktober 2016 pukul 15:30 WIB.

<http://bps.go.id>. Diakses pada 12 Oktober 2016 pukul 17:30 WIB.

<http://bps.sultra.go.id>. Diakses pada 20 November 2016 pukul 21:00 WIB.

<http://bps.sulut.go.id>. Diakses pada 12 Desember 2016 pukul 22:30 WIB.